

KONSELING LINTAS BUDAYA SEBAGAI STRATEGI SOSIALISASI PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR



Oleh Mamat Supriatna

DASAR PEMIKIRAN

SOSIALISASI Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun merupakan salah satu program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (Direktorat PSMP) yang sangat menarik untuk dicermati secara seksama. Betapa tidak? Sasaran program ini sangat beragam, baik status, posisi, maupun latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, politik, agama, dan budayanya. Sasaran program ini terentang dari rakyat biasa hingga pejabat eksekutif dan legislatif; dari mereka yang berpendidikan rendah (bahkan buta huruf), hingga yang berpendidikan tinggi. Dikarenakan keragaman sasaran, maka strategi sosialisasi Wajar dikembangkan ke dalam berbagai bentuk, salah satu di antaranya adalah konseling lintas budaya.

Konseling lintas budaya dijadikan salah satu strategi didasarkan atas pertimbangan, bahwa dalam sosialisasi Wajar akan selalu terjalin hubungan manusiawi (*human relationship*) yang bersifat interpersonal, walaupun adegan (*setting*) yang berlangsung berbentuk kelompok. Hubungan seperti itu sejalan dengan prinsip dasar konseling yang berupaya membantu (*helping*) individu melalui hubungan interpersonal (antar-pribadi) antara konselor (*helper*) dengan klien (*helpee*) untuk mencapai keberartian hidup.

Di samping itu, dalam hubungan manusiawi yang bersifat interpersonal sering sekali tercipta bentuk komunikasi yang melibatkan baik aspek pengetahuan, sikap, nilai, maupun keterampilan dari masing-

masing peserta komunikasi (komunikan) yang beragam dan rentan terhadap kesalah-pahaman budaya.

KONSEP KONSELING ANTAR ATAU LINTAS BUDAYA

ISU-ISU tentang antar atau lintas budaya yang disebut juga multibudaya meningkat dalam dekade 1960-an, yang selanjutnya melatari kesadaran bangsa Amerika pada dekade 1980-an. Namun, rupanya kesadaran itu disertai dengan kemunculan kembali sikap-sikap rasialis yang memecah-belah secara meningkat pula (Hansen, L. S., 1997:41). Hal ini menjelaskan pandangan, bahwa dibutuhkan pendekatan baru untuk kehidupan pada abad-21, baik yang melingkup pendidikan bagi orang biasa maupun profesional dalam bidang lintas serta keragaman budaya. Pendidikan yang dimaksud hendaknya menegaskan dimensi-dimensi keragaman dan perbedaan. Dengan kata lain, kecenderungan pendidikan yang berwawasan lintas budaya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia abad-21.

Dalam bidang konseling dan psikologi, pendekatan lintas budaya dipandang sebagai kekuatan keempat setelah pendekatan psikodinamik, behavioral dan humanistik (Paul Pedersen, 1991). Banyak pengarang menulis tentang konseling lintas budaya sering dari populasi minoritas mereka sendiri, untuk menyebut jalan pergerakan dari suatu yang menegaskan landasan pengetahuan Eurosentrik, yang sebelumnya melingkupi landasan pengetahuan pluralistik; akhirnya ditandai oleh pendekatan holistik untuk membantu dan penyembuhan, yang terfokuskan pada kelompok dan keluarga alih-alih pada individu, dan menggunakan sudut pandang yang integral alih-alih yang linear.

Suatu masalah yang berkaitan dengan lintas budaya adalah bahwa orang mengartikannya secara berlain-lainan atau berbeda, yang mempersulit untuk mengetahui maknanya secara pasti atau benar. Dapat

dinyatakan, bahwa konseling lintas budaya telah diartikan secara beragam dan berbeda-beda; sebagaimana keragaman dan perbedaan budaya yang memberi artinya.

Definisi-definisi awal tentang lintas budaya cenderung untuk menekankan pada ras, etnisitas, dan sebagainya; sedangkan para teoretisi mutakhir cenderung untuk mendefinisikan lintas budaya terbatas pada variabel-variabelnya (Sue dan Sue, 1990). Namun, argumen-argumen yang lain menyatakan, bahwa lintas budaya harus melingkupi pula seluruh bidang dari kelompok-kelompok yang tertindas, bukan hanya orang kulit berwarna, dikarenakan yang tertindas itu dapat berupa gender, kelas, agama, keterbelakangan, bahasa, orientasi seksual, dan usia (Trickett, Watts, dan Birman, 1994).

Para ahli dan praktisi lintas budaya pun berbeda paham dalam menggunakan *pendekatan universal atau etik*, yang menekankan inklusivitas, komonalitas atau keuniversalan kelompok-kelompok; atau *pendekatan emik (kekhususan-budaya)* yang menyoroti karakteristik-karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. Namun, Fukuyama (1990) yang berpandangan universal pun menegaskan, bahwa pendekatan inklusif disebut pula konseling "*transcultural*" yang menggunakan pendekatan emik; dikarenakan titik anjak batang tubuh literaturnya menjelaskan karakteristik-karakteristik, nilai-nilai, dan teknik-teknik untuk bekerja dengan populasi spesifik yang memiliki perbedaan budaya dominan.

Tampaknya konsep konseling lintas budaya yang melingkupi dua pendekatan tersebut dapat dipadukan sebagai berikut. *Konseling lintas budaya adalah pelbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas; atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan klien yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-*

variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosio-ekonomik, dan usia (Atkinson, Morten, dan Sue, 1989:37).

Konseling lintas budaya melibatkan konselor dan klien yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Agar berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Dengan demikian, maka konseling dipandang sebagai "perjumpaan budaya" (*cultural encounter*) antara konselor dan klien (Dedi Supriadi, 2001:6).

KOMPONEN-KOMPONEN PERBEDAAN BUDAYA

DALAM pengembangan konsep utuh bimbingan dan konseling di Indonesia, perlu diperhatikan komponen-komponen perbedaan budaya. Apalagi Indonesia dikenal dengan keragaman yang kompleks baik segi demografis, sosial-ekonomis, adat-istiadat, maupun latar budayanya. *Bhinneka Tunggal Ika* yang menjadi semboyan bangsa Indonesia dalam perspektif konseling lintas budaya, layaknya dikembangkan dimensi wawasan kebhinnekaannya (keragaman) dalam kerangka penegasan karakteristik keikaan yang kuat.

Demikian halnya dalam kegiatan sosialisasi penuntasan Wajar Dikdas, keragaman budaya bangsa hendaknya dijadikan faktor penting untuk dipertimbangkan, agar kegiatan tersebut tepat sasaran dan dapat mencapai hasil yang optimal.

Ada komponen-komponen budaya yang perlu diperhatikan dalam pengembangan konsep utuh bimbingan dan konseling, yang sejalan dengan landasan pengembangan program sosialisasi Wajar Dikdas di

Indonesia. Dalam pengembangan kedua kegiatan tersebut mesti terfokus pada orientasi nilai budaya yang menghendaki kehidupan masyarakat yang selaras dengan alam.

Koentjaraningrat (1993) menyebut orientasi nilai budaya sebagai mentalitas. Menurut dia, di antara sedemikian banyak komponen mentalitas yang dimiliki berbagai kebudayaan suku bangsa di Indonesia, dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terdapat empat komponen yang menonjol, yaitu : (1) konsepsi waktu yang sifatnya sirkuler (waktu itu "beredar" tidak "berlangsung"); (2) hidup terlalu bergantung pada nasib; (3) sikap kekeluargaan dan gotong-royong yang sangat kuat; dan (4) orientasi nilai budaya vertikal.

Persepsi waktu yang sirkuler adalah gagasan dan keyakinan, bahwa masa yang telah lampau selalu akan kembali. Persepsi waktu yang beredar tidak linier dilatari oleh kehidupan agraris, yang menunjukkan lingkaran proses pertanian akan terulang tiap tahun. Hal inipun masih melatarbelakangi cara berpikir orang Indonesia pada umumnya, meskipun kaum pelajar di Indonesia telah banyak berpikir berdasarkan konsep waktu yang linier. Kalau tidak demikian, maka tidak mungkin bangsa Indonesia merencanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan teliti.

Konsep waktu yang sirkuler dalam cara berpikir umumnya orang Indonesia, seyogianya dipahami oleh konselor sebagai bahan masukan guna mengantisipasi atau memprediksi persepsi dan sikap klien terhadap persoalan yang tengah dihadapinya. Persepsi yang demikian tentang waktu kemungkinan berdampak terhadap anggapan dan sikap, bahwa persoalan yang dihadapi adalah biasa sehingga tidak diperlukan pengatasan atau bantuan orang lain untuk mengatasinya; mengingat orang lain pun berhadapan dengan persoalan yang sama dan selalu berulang. Kalaupun persoalan itu dibicarakan, terbatas pada lingkup orang-orang yang berlatar atau berkaitan secara kekeluargaan dan hanya

menegaskan bahwa mereka pun mengalami hal yang sama. Pendek kata, persoalan kehidupan dipandang sebagai sesuatu yang "biasa", dibiarkan saja, karena akan hilang dan muncul secara alami. Dampaknya, diperkirakan "kita" tidak tertantang untuk kreatif dan inovatif dalam memproduksi piranti keras ataupun lunak.

Orientasi nilai budaya yang juga berakar pada kebudayaan agraris ditambah dengan keadaan yang diakibatkan oleh kemiskinan, adalah sikap hidup yang terlalu menggantungkan diri pada nasib. Menurut Koentjaraningrat (1993:4), apabila kita menginginkan peningkatan kemakmuran melalui jalur industrialisasi, maka orientasi nilai budaya atau mentalitas seperti itulah, yang sangat perlu diubah atau digeser menjadi mentalitas yang lebih aktif.

Orang yang terlalu bergantung pada nasib artinya menyerahkan diri pada nasibnya sendiri, kehilangan semangat untuk berikhtiar, menjalani kehidupan tanpa repot-repot membuat rencana, kendati banyak alternatif tidak memandang perlu mengambil pilihan, menunda keputusan sampai nasib menghampirinya, kehilangan harapan yang optimis; bahkan mungkin melupakan firman Allah atas pentingnya ikhtiar untuk mengubah nasib.

Dalam adegan pengembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, tampaknya para konselor mesti memperkaya wawasannya tentang konsep takdir *mubrom* dan *muallaq*, hingga dirinya menjadi pribadi yang aktif dan proaktif serta mengembangkan layanan konseling berdasarkan landasan nilai optimistik dan pandangan kehidupan yang mencerahkan secara hakiki.

Dengan kata lain, bahwa pengembangan strategi sosialisasi penuntasan Wajar Dikdas melalui konseling lintas budaya hendaknya dibangun di atas landasan bahwa terdapat nasib yang bisa diubah melalui ikhtiar. Sasaran sosialisasi harus dibantu dalam mengembangkan wawasan dan persepsi dirinya melalui konseling, hingga sampai kepada

kesadaran bahwa pendidikan merupakan upaya sadar yang sangat bermanfaat bagi kehidupan, dan pendidikan itu merupakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Komponen ketiga yang perlu diperhatikan adalah orientasi nilai budaya yang berupa sikap kekeluargaan dan gotong royong yang sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Kendati mentalitas ini menyiratkan kesamaan pada umumnya, tetapi titik anjak dan bentuk pengoperasionalannya berbeda-beda pada sebagian besar anggota masyarakat. Koentjaraningrat (1993) mengemukakan, dalam diskusi-diskusi pernah diajukan kemungkinan, bahwa untuk industrialisasi diperlukan mentalitas yang lebih mandiri, lebih bertanggungjawab sendiri, tidak terlampau menggantungkan diri pada keluarga ataupun bantuan gotong-royong dari lingkungan. Selanjutnya dia menyatakan, banyak di antara kita memang masih perlu membiasakan diri untuk bersikap lebih mandiri dalam banyak hal, serta lebih berani bertanggungjawab atas kekurangan dan kesalahan kita, tanpa mengurangi asas kekeluargaan dan penggeseran mentalitas yang terlalu menggantungkan diri pada gotong-royong. Namun tidak perlu khawatir, bahwa nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong menghambat kemajuan; sebab walaupun asas kekeluargaan dalam masyarakat Jepang tetap kuat, bangsa Jepang telah berhasil menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia, dan memiliki sistem industri yang sangat maju.

Implikasi dari komponen ketiga bagi pengembangan konsep utuh bimbingan dan konseling di Indonesia adalah pengembangan piranti-piranti strategis untuk kepentingan konseling kelompok dan konseling keluarga dalam perspektif lintas budaya. Dasar pertimbangannya adalah, bahwa orientasi nilai budaya kekeluargaan dan gotong-royong merupakan modal landasan konseptual yang dapat dijadikan mediator guna memfasilitasi keberlangsungan konseling lintas budaya dalam adegan

kelompok ataupun keluarga. Rupanya, studi-studi ke arah penggalian dan pengembangan konsep ini perlu ditingkatkan guna mengokohkan bangun konseling lintas budaya di Indonesia.



Kerja sama dan saling percaya sebagai wujud nilai sosial

Dalam kegiatan sosialisasi Wajar Dikdas, di samping pendekatan individual layak pula dilakukan dengan pendekatan kelompok, baik dalam adegan keluarga maupun sebaya (*peer group*). Meskipun sosialisasi dilakukan dengan pendekatan kelompok, akan tetapi sasaran utamanya adalah individu-individu yang terdapat dalam kelompok tersebut.

Komponen yang keempat, yaitu orientasi vertikal, terasa kuat tidak hanya dalam masyarakat Jawa dan Bali, tetapi ternyata juga dalam sebagian besar berbagai suku bangsa penduduk Sumatera dan Indonesia Timur. Kenyataan ini merupakan hasil penelitian orang Indonesia sendiri di beberapa tempat di Nusantara (Koentjaraningrat, 1993). Secara nyata orientasi vertikal itu adalah ketaatan pada orang tua, orang senior, guru, pemimpin, orang berpangkat tinggi, komandan, dan sebagainya, sehingga seseorang dengan orientasi vertikal tidak akan bertindak tanpa suatu instruksi atau restu dari atas.

Khusus dalam kebudayaan Jawa, ketaatan merupakan sifat yang dinilai sangat tinggi. Anak yang *manut* (yaitu taat) adalah anak yang sangat terpuji, sementara anak yang selalu mempunyai kehendak sendiri dan gemar mengeksplorasi segala hal di sekitarnya, dianggap mengganggu dan tidak dianggap sebagai anak yang sopan dan santun.

Disinyalir pula oleh Koentjaraningrat, bahwa sangat disayangkan kebanyakan orang di Indonesia masih kurang taat pada hal-hal yang kurang konkret, seperti misalnya hukum dan peraturan-peraturan, apalagi pada hal yang lebih abstrak, yaitu prinsip. Namun, untunglah orang Indonesia pada umumnya taat menjalani ibadah keagamaan, sehingga pelaksanaan sila pertama dalam ideologi negara kita dapat memperkuat ketenteraman jiwa manusia, yang hidup dalam masa pancaroba yang sedang dan masih akan dialami dalam 25 tahun mendatang.

Tampaknya ketaatan seperti itu perlu dipersoalkan, terutama dalam kerangka penumbuh-kembangan prinsip disiplin yang tidak bergantung pada ada atau tidak adanya pengawasan. Konsep Islam tentang *khusyu'* dalam shalat dan *imsyak* dalam *shaum* perlu dikaji secara komprehensif untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam landasan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan konseling.

Dalam konteks pengembangan konsep utuh bimbingan dan konseling di Indonesia, rupanya diperlukan pengkajian lintas-disiplin yang terfokus pada perspektif metafisis tentang orientasi nilai vertikal dan latar belakang sikap "orang atasan" terhadap perilaku dan nilai ketaatan. Hasil pengkajian dipandang sumbangan konseptual yang besar dan amat berharga, terutama bagi pengembangan bimbingan dan konseling yang berpijak pada nilai-nilai budaya lokal tetapi berlaku universal.

UNSUR LINTAS BUDAYA DALAM SOSIALISASI WAJAR

UNTUK memasukkan unsur lintas budaya dalam merancang dan mengimplementasikan program sosialisasi Wajar, terlebih dahulu dilakukan pengkajian dalam rangka menjawab tantangan utama bagi seorang petugas sosialisasi. Pengkajian dapat dilakukan, baik dalam bentuk studi literatur, pengamatan intensif, maupun secara partisipasi dalam pergaulan dengan khalayak kliental (sasaran sosialisasi). Pengkajian

yang dimaksud terutama difokuskan atau untuk menjawab tantangan, bahwa petugas sosialisasi yang berhubungan dengan individu yang berbeda latar belakang budayanya, hendaknya mampu dan sanggup mendemonstrasikan pemahaman dan apresiasinya terhadap perbedaan budaya.



Pendidikan mengemban misi pengembangan generasi mendatang

Kemampuan dan kesanggupan tersebut pada gilirannya diformulasikan ke dalam: (1) sebagian pernyataan tujuan yang akan dicapai melalui program sosialisasi Wajar yang dirancang; dan (2) keterampilan-keterampilan yang bersifat responsif untuk kepentingan layanan sosialisasi terhadap klien (sasaran).

Langkah berikutnya adalah merefleksi kondisi lingkungan budaya masyarakat (adekan sosial/lembaga), baik yang menyangkut keragaman asal-usul personel dan pola interaksi di antara mereka, pelbagai variabel latar belakang yang memungkinkan bias budaya, maupun budaya organisasi dan kepemimpinan yang berkembang di sana. Refleksi ini penting, terutama untuk merancang perangkat-perangkat pengidentifikasi dan garis-garis besar strategi intervensi melalui layanan bimbingan dan konseling.

Hasil pepaduan kedua langkah tersebut dilanjutkan pada penyusunan program sosialisasi Wajar yang responsif secara budaya, yang melibatkan 3 *C's* (Yagi, 1998), yaitu melingkupi: *counselling* (konseling), *consultation* (konsultasi), dan *coordination* (koordinasi).

Dalam mengimplementasikannya, sebagai seorang petugas sosialisasi yang responsif secara budaya, harus berupaya menggunakan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan multibudaya di dalam konteks pertemuan yang terfokus pada perkembangan, karakteristik, dan kebutuhan sasaran yang berasal dari lingkungan yang secara budaya berbeda.

REFERENSI

- Alisjahbana, S. T. (1986). *Essay of a New Anthropology; Values as Integrating Forces in Personality, Society and Culture*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Arredondo, P. Psalti, A., & Cella, K. (1993). "The Woman Factor in Multicultural Counseling." *Counseling and Human Development*, 25, (8), 1-8.
- Botkin, J.W., Elmandjra, M., & Malitza, M. (1979). *No Limits To Learning*. New York: Pergamon Press.
- Buchori, M. (1987). Mendidik Masyarakat Menyongsong Fase Lepas-Landas dan Masa Depan Bangsa, (*Makalah Seminar Nasional*). Bandung: IKIP.
- Carter, R. T. (1991). "Cultural Values: A Review of Empirical Research and Implications for Counseling." *Journal of Counseling and Development*, 70, (1), 164-173.
- Delors, J. et. al. (1996). *Learning: The Treasure Within*. Paris: UNESCO.
- Drake, C. (1989). *National Integration in Indonesia; Patterns and Policies*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Fukuyama, M. A. (1990). "Taking a Universal Approach to Multicultural Counseling." *Counselor Education and Supervision*, 30, 6-17.
- Garna, J. K., & Ade M. K. (1999). *Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Suatu Renungan Pembentukan Indonesia Merdeka Ke Arah Kebudayaan Kebangsaan*. Bandung: Primaco Akademika, c.v.
- Hansen, L. S. (1997). *Integrative Life Planning; Critical Tasks for Career Development and Changing Life Patterns*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Inkeles, A. (1983). "Modernisasi Manusia", dalam Myron Weiner (Ed). *Modernisasi; Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Jarvis, P. (1992). *Paradoxes of Learning; On Becoming an Individual in Society*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Kartadinata, S. (2000). "Pendidikan untuk Pengembangan Sumberdaya Manusia Bermutu Memasuki Abad XXI: Implikasi Bimbingannya." *Psikopedagogia*, 1, (1), 1-12.
- Koentjaraningrat. (1993). "Manusia Indonesia Bermutu." *Kompas*, Kamis-Jumat, 19-20 Agustus 1993, halaman 4 dan 5.
- Marzurek, K., Winzer, M. A., & Majorek, C. (Eds.) (2000). *Education in a Global Society; A Comparative Perspective*. Boston: Allyn and Bacon.
- Rahardjo, M. D. (Ed.) (1987). *Insan Kamil; Konsepsi Manusia Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Grafitipress.
- Sardar, Z. (1979). *The Future of Muslim Civilization*. London: Croom Helm.
- A.b. Rahmani Astuti (1993). *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*. Bandung: Mizan.
- Supriadi, D. (2001). *Konseling Lintas-Budaya: Isu-isu dan Relevansinya di Indonesia. (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Supriatna, M. dkk. (2003). *Implementasi Pendidikan Berwawasan Kebangsaan*. (Laporan). Kerjasama Fakultas Ilmu Pendidikan, UPI dengan Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama, Ditjen Dikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
- Supriatna, M. (2003). *Strategi Bimbingan dan Konseling Berwawasan Kebangsaan Untuk Mengembangkan Sumberdaya Manusia Bermutu Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. (Kertas Kerja). Bandung: Konvensi Nasional XIII Bimbingan dan Konseling, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) 2003Beserta Penjelasannya*. Bandung: Fokusmedia.
- Unesco-APNIEVE. (2000). *Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni*. Bangkok: Kantor Prinsipal Unesco untuk Kawasan Asia-Pasifik & Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ward, B. (1982). *Nationalism and Ideology*, a. b. Daniel Prasetyo, *Manusia dalam Kemelut Ideologi*. Bandung: Iqra.
- Yagi, D. T. (1998). *Multicultural Counseling and the School Counselor*. [Online]. Tersedia di <http://ericass.uncg.edu/virtuallib/diversity/1064.html>. [26 September 2001].